

Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota Indonesia

The Effect of School Operational Assistance on the School Enrolment Rates of Children with Disabilities in Indonesian Regencies/Cities

doi: 10.24832/jpnk.v8i2.4238

Siska Dewi & Thia Jasmina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia - Indonesia

Email: siska.dewi@ui.ac.id; thia.jasmina@ui.ac.id

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Vol. 8, Nomor 2, Desember 2023

ISSN-p: 2460-8300

ISSN-e: 2528-4339

Naskah diterima: 07-08-2023

Naskah disetujui: 06-11-2023

Terbit: 30 Desember 2023

Abstract: *This research aims to determine the effect of the School Operational Assistance (BOS) program given to special schools (SLB) on the School Enrolment Rate (APS) of students with disabilities at the district/ city level in 2020-2021. This study uses a panel data analysis method. The results show that there is no significant influence between the BOS funds provided for SLB and the APS of students with disabilities. The independent variables that have a significant influence are the percentage of severe disabilities, the percentage of disabilities living in urban areas, the ratio of inclusive school availability, average length of schooling, and regional. Meanwhile, the independent variables that are not significant are the SLB teacher-student ratio, SLB availability ratio, GRDP per capita, and life expectancy. These results indicate that there is a need to evaluate the BOS program for special schools by considering the real operational needs in schools, the level of education, and the types of needs or disorders experienced by students with disabilities. In addition, it is necessary to increase assistance for families having students with disabilities to reduce the personal costs of educating students with disabilities.*

Keywords: *School Operational Assistance, school enrolment rate, student with disabilities, special schools, inclusive education*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak disabilitas pada tingkat kabupaten/kota di tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dana BOS yang diberikan untuk SLB terhadap APS anak disabilitas. Adapun variabel independen yang berpengaruh signifikan yaitu persentase disabilitas berat, persentase disabilitas yang tinggal di wilayah urban, rasio ketersediaan sekolah inklusi, rata-rata lama sekolah, dan regional. Sedangkan variabel independen yang tidak signifikan yaitu variabel rasio guru-siswa SLB, rasio ketersediaan SLB, PDRB per kapita, dan usia harapan hidup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap program BOS untuk SLB dengan mempertimbangkan kebutuhan riil operasional di sekolah, jenjang*

pendidikan, dan jenis kebutuhan atau gangguan yang dialami oleh siswa penyandang disabilitas. Selain itu, perlu ditingkatkan bantuan untuk keluarga dengan anak penyandang disabilitas guna meringankan biaya personal pendidikan anak penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Bantuan Operasional Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah, siswa penyandang disabilitas, SLB, pendidikan inklusi*

PENDAHULUAN

Pendidikan yang tinggi dan bermutu merupakan hak setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Namun, beberapa penelitian membuktikan bahwa di negara berkembang, tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penyandang disabilitas ternyata lebih rendah dibandingkan nondisabilitas (UNESCO, 2015; Lamichhane & Kawakatsu, 2015; Mont & Nguyen, 2013; Mizunoya *et al.*, 2018). Selain pendidikan, penyandang disabilitas pun mengalami kesulitan dalam menikmati hasil pembangunan seperti kesehatan, lapangan pekerjaan, ataupun layanan umum lainnya. Kondisi tersebut akhirnya menjadikan disabilitas erat kaitannya dengan kemiskinan (Mitra *et al.*, 2013; Mitra *et al.*, 2017; Erickson *et al.*, 2018).

Pembangunan yang inklusif menjadi upaya pemerintah untuk dapat memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menunjukkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata. Sasaran global dari tujuan tersebut adalah menekankan target berkelanjutan pada setiap orang tanpa meninggalkan pihak-pihak tertentu (*no one left behind*) dalam proses pencapaiannya. Pada peraturan tersebut Indonesia menargetkan bahwa tahun 2030, semua anak termasuk penyandang disabilitas mampu menamatkan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah tanpa biaya, setara, dan bermutu. Salah satu indikator keberhasilan tujuan *SDGs* tersebut adalah meningkatnya partisipasi

sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

Capaian pendidikan anak penyandang disabilitas lebih rendah dibandingkan dengan nondisabilitas (Bappenas, 2021). Penyandang disabilitas yang tidak/belum pernah bersekolah dan tidak tamat SD memiliki persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non-disabilitas yaitu sebesar 12,9% untuk penyandang disabilitas dan 2,4% untuk non-disabilitas (Bappenas, 2021). Hal ini didukung oleh data dari UNESCO (2009) yang menunjukkan bahwa terdapat 90% anak penyandang disabilitas usia 18 tahun di negara berkembang yang tidak bersekolah. Data ini mencerminkan adanya kesulitan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan.

Di Indonesia, Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak penyandang disabilitas tahun 2020 hanya berkisar 75% (Badan Pusat Statistik, 2020). Faktor yang menyebabkan rendahnya APS anak penyandang disabilitas tersebut di antaranya adalah (a) faktor internal seperti gangguan/hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas (Noviani, 2019; Nisa *et al.*, 2018); (b) faktor eksternal seperti ekonomi, sosial, dan fisik (Downey, 1995; Black *et al.*, 2005; Lamichhane, 2015) dan (c) kebijakan pemerintah (Filmer, 2008).

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah dengan menerapkan dua jenis pendidikan yang dapat melayani anak penyandang disabilitas yaitu pendidikan khusus dan pendidikan inklusi (Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009). Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan yang dikhususkan untuk anak penyandang disabilitas. Dalam pemberian

layanannya, pendidikan khusus menerapkan kurikulum yang khusus, sarana dan prasarana yang terpisah dari anak pada umumnya, dan juga dilayani oleh guru pendidikan khusus. Sedangkan pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan yang memfasilitasi anak penyandang disabilitas untuk dapat belajar bersama dengan anak pada umumnya, dalam lingkungan, kurikulum, dan guru yang sama. Namun, tetap ada beberapa penyesuaian, tergantung dengan hambatan dan kebutuhan anak penyandang disabilitas tersebut.

Di Indonesia, pendidikan khusus ini dikenal dengan nama Sekolah Luar Biasa (SLB) yang telah ada sejak tahun 1952 dengan nama Sekolah Rakyat Latihan Luar Biasa (SLBN Cicendo, 2023). Pada tahun 2009, Indonesia mulai menerapkan pendidikan inklusi, yang memfasilitasi anak penyandang disabilitas untuk dapat bersekolah di sekolah pada umumnya dan memperoleh layanan yang sama seperti anak lainnya. Hal ini tertuang dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa setiap kabupaten/kota wajib memiliki minimal satu sekolah umum di setiap jenjangnya yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Seiring dengan diterapkannya kebijakan tersebut, sampai saat ini masih banyak hambatan yang dialami untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Beberapa di antaranya terkait dengan sarana-prasarana, infrastruktur, budaya masyarakat, dan juga kompetensi tenaga pendidiknya (Abongdia *et al.*, 2015; Bhatnagar & Das, 2014; Genova, 2015; Sari & Hendriani, 2021). Hal tersebut menyebabkan SLB masih menjadi pilihan anak penyandang disabilitas untuk dapat menikmati pendidikan, terutama bagi anak penyandang disabilitas yang memiliki hambatan/kesulitan yang lebih berat dan tidak memungkinkan untuk bersekolah di pendidikan inklusi.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menunjukkan bahwa 57% anak penyandang disabilitas bersekolah di pendidikan khusus/SLB dan sisanya

tersebar di jenis pendidikan inklusi yaitu SD, SMP, SMA/SMK (Kemendikbudristek, 2022). Sementara itu, jumlah SLB negeri masih terbatas jumlahnya. Pada tahun 2020 jumlah SLB negeri hanya sebesar 27% dari jumlah total SLB di Indonesia (Kemendikbudristek, 2020). Terbatasnya jumlah SLB negeri ini pun menjadi salah satu penyebab sulitnya akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Hal ini yang kemudian menyebabkan keluarga dengan anak penyandang disabilitas harus mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih besar untuk menyekolahkan anak mereka di SLB swasta.

Kebijakan pendidikan lainnya bagi penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan di Indonesia adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah dalam rangka memenuhi Wajib Belajar 12 Tahun melalui subsidi pendidikan yang diberikan ke sekolah, untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dalam pendidikan (World Bank, 2014).

Dana BOS memiliki tujuan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas. Tujuan tersebut yaitu untuk memudahkan akses belajar peserta didik penyandang disabilitas dan memperluas kesempatan yang sama (*equal opportunity*) bagi siswa penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu agar dapat mengakses layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, baik pada sekolah negeri maupun swasta (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019). Subsidi pendidikan yang diberikan oleh pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah permintaan pendidikan pada masyarakat.

Penelitian mengenai BOS ini telah dilakukan pada berbagai jenjang pendidikan dengan hasil yang beragam, di antaranya dilakukan oleh Rutfiana & Hayati (2020) yang menunjukkan bahwa dana BOS berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA. Namun, tidak signifikan pada APK jenjang SD dan SMP, karena subsidi pendidikan dapat berpengaruh pada jumlah permintaan masya-

rakat terhadap pendidikan di jenjang SMA. Pada jenjang SD dan SMP tidak berpengaruh karena APK pada jenjang SD dan SMP yang memang sudah tinggi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang (2022) menunjukkan bahwa dana BOS tidak berpengaruh terhadap peningkatan APM untuk jenjang SMA dan SMK. Dana BOS dinilai masih kurang untuk membiayai operasional sekolah dan masih lemahnya akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK.

Penelitian lain yang berhubungan dengan subsidi pendidikan untuk penyandang disabilitas adalah tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Penelitian Kautsar *et al.* (2022) menunjukkan bahwa PIP memiliki dampak positif yang signifikan untuk meningkatkan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun, penelitian lain dari Pratinengtyas (2021) menunjukkan bahwa program PIP tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan anak penyandang disabilitas. Hal tersebut dikarenakan masih besarnya anggaran pendidikan yang harus dikeluarkan oleh keluarga dengan anak penyandang disabilitas.

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini pun dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh BOS untuk SLB terhadap APS anak penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pembaruan untuk memperkaya literatur yang spesifik membahas hubungan antara dana BOS terhadap anak penyandang disabilitas, serta menambah referensi metode penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan anak penyandang disabilitas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel yaitu penggabungan antara pendekatan *cross section* dan *time series* dengan menggunakan aplikasi Stata. Adapun jumlah observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 296 kabupaten/

kota yang menerima dana BOS minimal Rp120 juta pada tahun 2020 dan 2021. Kabupaten/kota yang menerima dana BOS minimal Rp120 juta menandakan bahwa sekolah pada kabupaten/kota tersebut telah memenuhi minimal *fixed cost* yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional sekolah.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak penyandang disabilitas usia 7-18 tahun. APS ini merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah anak penyandang disabilitas kelompok usia 7-18 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan jumlah anak kelompok usia sekolah (7-18 tahun). Pada tahun 2020, jumlah anak penyandang disabilitas kelompok usia 7-18 tahun adalah sebanyak 763.068 dengan jumlah siswa yang bersekolah sebanyak 526.155 atau sebesar 74% anak penyandang disabilitas usia 7-18 tahun di Indonesia masih bersekolah (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dalam menghitung APS anak penyandang disabilitas penulis tidak memasukkan data penyandang disabilitas yang bersekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Hal tersebut dikarenakan dana BOS yang diberikan oleh Kemendikbudristek tidak melibatkan sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Agama.

Berdasarkan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KorMaret 2020 dan 2021, yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas adalah anggota rumah tangga yang setidaknya memiliki satu atau lebih gangguan dalam delapan jenis kesulitan berikut.

- a. kesulitan/gangguan penglihatan;
- b. kesulitan/gangguan pendengaran;
- c. kesulitan/gangguan berjalan/ naik tangga;
- d. kesulitan/gangguan menggunakan atau menggerakkan tangan/jari;
- e. kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi;
- f. gangguan perilaku dan emosional;
- g. kesulitan berbicara/memahami/

berkomunikasi; dan
h. kesulitan mengurus diri sendiri.

Adapun variabel bebas utama dalam penelitian ini adalah dana BOS yang diberikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) pada tahun 2019 dan 2020 yang bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Kemendikbudristek.

Penelitian ini pun memasukkan variabel kontrol/bebas lainnya yang bertujuan untuk mengurangi hasil perhitungan yang bias. Variabel tersebut meliputi data yang berkaitan dengan karakteristik penyandang disabilitas, karakteristik pendidikan, karakteristik sosial, dan ekonomi, serta karakteristik regional setiap kabupaten/kota.

Adapun model ekonometrika yang digunakan dalam analisis APS anak penyandang disabilitas di kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$aps_{it} = \beta_0 + \beta_1 lnbos_{it-1} + \beta_2 disabilitasberat_{it} + \beta_3 urban_{it} + \beta_4 rgs_{it} + \beta_5 rasioSLB_{it} + \beta_6 rasioinklusi_{it} + \beta_7 lnPDRB_{it} + \beta_8 uhh_{it} + \beta_9 lamasekolah_{it} + \beta_{10} regional_{it} + u_{it}$$

Keterangan:

aps: angka partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas usia 7-18 tahun (persentase 0-100)

lnbos: logaritma natural dari total dana BOS yang diberikan kepada SLB

disabilitasberat: persentase penyandang disabilitas berat (persentase 0-100)

urban: persentase penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah urban/perkotaan (persentase 0-100)

rgs: rasio guru dan siswa penyandang disabilitas yang ada di SLB (rasio)

rasioSLB: rasio SLB terhadap 1.000 penduduk disabilitas 7-18 tahun (rasio)

rasioinklusi: rasio Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi terhadap 1.000 penduduk disabilitas usia 7-18 tahun (rasio)

lnPDRB: logaritma natural dari PDRB per kapita

uhh: umur harapan hidup (tahun)

lamasekolah: rata-rata lama sekolah (tahun)

regional: *Dummy* wilayah (Jawa, Bali, Sumatera= 1, lainnya= 0)

u_{it} : residual/error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 1. Jumlah observasi penelitian sebanyak 592 wilayah yang terdiri dari 296 kabupaten/kota dalam kurun waktu dua tahun (2020-2021).

Tabel 1 Statistik Deskriptif Penelitian

Variabel	Obs*	Mean	Std. Dev.	Min	Max
APS (%)	592	79,86	19,03	20,39	100
BOS (juta rupiah)	592	863,63	934,53	120	6.321
Disabilitas Berat (%)	592	34,33	24,43	0	100
Urban (%)	592	53,54	36,80	0	100
RGS (rasio)	592	5,63	1,81	1,48	13,31
Rasio SLB (rasio)	592	5,77	6,83	0,21	47,81
Rasio Inklusi (rasio)	592	4,97	6,97	0	50,75
PDRBkap (ribu rupiah)	592	57.919,31	58.522,84	5.422	588.290
UHH (tahun)	592	70,83	3,00	61,48	77,73
Lama sekoah (tahun)	592	8,73	1,51	4,85	12,83
Regional (kategori): Jawa, Bali, Sumatera=1 Lainnya=0 (base)	592	0,71**	0,45	0	1

Sumber: Olahan penulis

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata APS anak penyandang disabilitas adalah sebesar 79,86% dengan persentase APS terendah adalah 20,39% yaitu Kabupaten Sampang dan yang tertinggi adalah 100%, di antaranya adalah Kota Ambon, Kota Jambi, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gowa.

Rata-rata dana BOS untuk SLB yang diberikan kepada 296 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2020-2021 adalah sebesar Rp863 juta. Besaran terendah yaitu Rp120 juta di antaranya adalah Kota Sorong, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Daerah dengan besaran dana BOS tertinggi sebesar Rp6,32 milyar yaitu Kabupaten Bandung.

Untuk karakteristik individu penyandang disabilitas, Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata persentase penyandang disabilitas (variabel disabilitas berat) yang memiliki tingkat gangguan yang berat sebesar 34,3%, dengan nilai terendah 0% dan tertinggi 100%. Rata-rata penyandang disabilitas di Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan (variabel urban) sebanyak 53,54%, dengan persentase terendah 0% dan tertinggi 100% tinggal di perkotaan.

Untuk karakteristik pendidikan, Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa rata-rata rasio guru dan siswa SLB adalah 5,63 dengan rasio guru-siswa terendah adalah 1,48 dan tertinggi 13,34. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa rasio ideal untuk satu guru adalah menangani 5-8 siswa disabilitas pada jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa-Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB-SMALB). Rasio guru dan siswa SLB yang tinggi atau melebihi ukuran rasio ideal mengindikasikan bahwa Indonesia masih kekurangan guru SLB. Hal ini tentunya akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang diberikan di kelas.

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata rasio SLB per 1.000 anak penyandang disabilitas adalah 5,77 dengan rasio SLB terendah adalah 0,21

yaitu Kabupaten Jepara dan rasio tertinggi adalah 47,81 yaitu Kabupaten Muna. Secara nasional rata-rata rasio SLB per 1.000 anak penyandang disabilitas ini menunjukkan bahwa paling sedikit tersedia lima SLB untuk setidaknya 1.000 anak penyandang disabilitas. Sedangkan untuk rata-rata rasio sekolah inklusi per 1.000 sebesar 4,97 sekolah dengan rasio sekolah paling sedikit adalah 0 dan yang tertinggi sebesar 50,75 yaitu di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini mengindikasikan masih terjadinya ketimpangan, yaitu masih adanya kabupaten/kota yang tidak memiliki sekolah inklusi sama sekali, sedangkan ada pula daerah yang terdapat sekolah inklusi sebanyak 50 sekolah inklusi untuk 1.000 anak penyandang disabilitas.

Untuk karakteristik sosial ekonomi kabupaten/kota, Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah sebesar Rp57,9 juta dengan PDRB per kapita terkecil adalah Kota Metro sebesar Rp54,2 juta dan yang terbesar adalah Kabupaten Morowali sebesar Rp588,29 juta. Untuk usia harapan hidup, rata-rata nasional adalah sebesar 70,8 tahun, dengan nilai terkecil adalah 61,48 tahun untuk Kabupaten Alor, dan yang terbesar adalah 77,73 tahun untuk Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan rata-rata lama sekolah secara nasional sebesar 8,7 tahun dengan rata-rata lama sekolah terendah adalah 4,85 tahun yaitu Kabupaten Sampang, dan 12,83 tahun untuk Kota Banda Aceh.

Selain faktor sosial ekonomi tersebut, digunakan variabel regional yang diduga dapat memengaruhi APS penyandang disabilitas. Berdasarkan Tabel 1 sebanyak 70,94% sampel penelitian berada di regional barat yaitu Jawa, Bali, dan Sumatera.

Analisis Hasil Estimasi

Hasil estimasi regresi disajikan dalam Tabel 2 dengan menggunakan empat kombinasi regresi. Regresi ke-1 adalah regresi dengan hanya

Tabel 2 Hasil Estimasi

VARIABLES	(1) Regresi 1	(2) Regresi 2	(3) Regresi 3	(4) Regresi 4
lnbos	2.034** (0.935)	1.705* (0.941)	1.468 (1.021)	0.979 (1.028)
disabilitasberat	-0.214*** (0.0298)	-0.226*** (0.0298)	-0.220*** (0.0298)	-0.218*** (0.0296)
urban	0.0875*** (0.0227)	0.0888*** (0.0225)	0.0498* (0.0275)	0.0515* (0.0273)
rgs		-0.586 (0.433)	-0.537 (0.459)	-0.683 (0.457)
rasioslb		0.0874 (0.120)	0.0274 (0.123)	0.0677 (0.123)
rasioinklusi		0.339*** (0.113)	0.327*** (0.114)	0.296*** (0.114)
lnpdrbkap			-0.291 (1.383)	-0.195 (1.368)
uhh			0.295 (0.325)	0.0798 (0.332)
lamasekolah			1.473** (0.719)	1.579** (0.713)
regional				5.038*** (1.864)
Constant	69.65*** (5.624)	73.18*** (6.057)	46.06** (22.22)	59.45*** (22.54)
Observations	592	592	592	592
R-squared	0.1096	0.1186	0.1254	0.1256
Number of Wilayah	296	296	296	296

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Sumber: Olahan penulis

memasukkan variabel bebas utama yaitu BOS dan karakteristik individu penyandang disabilitas yaitu persentase disabilitas dengan gangguan berat (variabel disabilitas berat) dan persentase disabilitas yang tinggal di wilayah perkotaan (variabel urban). Regresi ke-2 adalah regresi dengan menambahkan karakteristik pendidikan yaitu rasio guru dan siswa (variabel rgs), rasio

ketersediaan sekolah SLB (variabel rasio slb), dan rasio ketersediaan sekolah inklusi (variabel rasio inklusi). Regresi ke-3 adalah regresi dengan menambahkan karakteristik sosial dan ekonomi yaitu PDRB per kapita (variabel pdrbkap), usia harapan hidup (variabel uhh). Regresi ke-4 adalah regresi dengan menambahkan karakteristik wilayah yaitu regional. Dari keempat

kombinasi regresi tersebut, regresi ke-4 adalah regresi yang digunakan untuk analisis. Dari regresi 4, terlihat bahwa variabel bebas utama yaitu BOS yang diberikan kepada SLB (variabel *Inbos*) tidak signifikan memengaruhi APS anak penyandang disabilitas.

Sampai saat ini, belum banyak penelitian kuantitatif yang membahas mengenai pengaruh BOS terhadap APS penyandang disabilitas. Namun, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai subsidi pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa subsidi pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran pendidikan keluarga dengan anak penyandang disabilitas (Pratiningtyas, 2021). Penelitian kualitatif lain dilakukan pula oleh Zamjani (2019) menunjukkan hasil bahwa subsidi pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pun belum sesuai dengan besaran yang dibutuhkan oleh siswa penyandang disabilitas.

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, beberapa hal yang mungkin dapat menjadi penyebab tidak berpengaruh signifikannya BOS terhadap APS penyandang disabilitas adalah sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, BOS tidak memengaruhi partisipasi anak penyandang disabilitas untuk sekolah disebabkan relatif rendahnya nilai dana BOS yang diberikan kepada SLB jika dibandingkan dengan kebutuhan anak penyandang disabilitas. Hal ini berdasarkan laporan penggunaan dana BOS SLB pada tahun 2019-2020 (Tabel 3). Persentase penggunaan dana BOS yang tertinggi yaitu pada komponen honor sebesar 21,17% tahun 2019 dan meningkat menjadi 34,73% pada tahun 2020. Peningkatan ini seiring dengan perubahan aturan mengenai alokasi maksimal penggunaan pembayaran honor. Pada tahun 2019 hanya sebesar 15% untuk sekolah negeri, dan 30% untuk sekolah swasta (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019). Sedangkan pada tahun 2020 alokasi dana maksimal untuk pembayaran honor

sebesar 50% bagi SLB negeri maupun SLB swasta (Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020).

Tabel 3 mengindikasikan bahwa kebutuhan pembayaran honor di SLB memang lebih tinggi. Saat aturan mengenai alokasi maksimal pembayaran honor ditingkatkan pada tahun 2020, penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor di SLB mengalami peningkatan yang cukup tinggi pula.

Dalam Juknis BOS 2019 dan 2020, komponen pembayaran honor ini digunakan untuk pembayaran guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, kebersihan, dan tenaga ahli/tenaga teknis. Meskipun komponen pembayaran honor ini memiliki persentase tertinggi pada laporan penggunaan BOS, namun apabila dibagi per *unit cost*-nya, untuk satu orang guru hanya memperoleh Rp614.723,- per bulannya. Besaran ini jika dibandingkan dengan standar upah minimum regional (UMR) tentunya sangat jauh di bawah rata-rata, yang pada tahun 2020, rata-rata UMR di Indonesia sudah mencapai Rp2,6 juta.

Komponen rata-rata penggunaan dana BOS tertinggi adalah komponen pembiayaan administrasi kegiatan sekolah yaitu sebesar 19,52% pada tahun 2019 kemudian turun menjadi 16,86% pada tahun 2020. Apabila dibagi per *unit cost*, komponen administrasi sekolah ini hanya sebesar Rp233.565,-/rombel/bulan. Padahal, untuk komponen ini cukup banyak pembiayaan yang perlu dikeluarkan, seperti pembelian alat tulis kantor, peralatan kebersihan, peralatan kesehatan, biaya rapat, pengelolaan laman (*website*), ataupun pelaksanaan sekolah hijau yang tentunya menjadi rutinitas bulanan yang harus dilaksanakan oleh sekolah.

Pembiayaan komponen lainnya yang menjadi perhatian adalah komponen yang berkaitan langsung dengan siswa, seperti komponen kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yaitu sebesar Rp17.152,-/siswa/bulan; kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran sebesar

Tabel 3 Laporan Penggunaan Dana BOS SLB

No	Komponen	Laporan Penggunaan Dana BOS SLB		
		2019	2020	
		Persentase	Persentase	Rata-rata per <i>unit</i>
1	Penerimaan Peserta Didik Baru	0,98%	1,17%	124.764 /rombel/tah
2	Pengembangan Perpustakaan	9,07%	2,70%	51.539 /rombel/bul
3	Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	13,50%	11,12%	17.152 /siswa/bula
4	Kegiatan Asesmen/ Evaluasi Pembelajaran	6,02%	2,94%	3.874 /siswa/bula
5	Administrasi Kegiatan Sekolah	19,52%	16,86%	233.565 /rombel/bul
6	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	4,58%	3,20%	40.292 /guru/bulan
7	Layanan Daya dan Jasa	6,14%	8,02%	56.021 /rombel/bul
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	11,99%	13,60%	126.837 /rombel/bul
9	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	6,70%	5,52%	12.138 /siswa/bula
10	Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus	0,00%	0,08%	994 /siswa/bula
11	Penyelenggaraan Kegiatan UKK	0,00%	0,06%	32 /siswa/bula
12	Pembayaran Honor	21,17%	34,73%	614.723 /guru/bulan
13	Biaya lainnya	0,33%	0,00%	

Sumber: Tim Publikasi BOS Kemendikbudristek (2019a dan b), diolah.

Rp3.874,-/siswa/bulan; dan penyediaan alat multimedia pembelajaran sebesar Rp12.138,-/siswa/bulan. Komponen tersebut merupakan komponen yang berkaitan langsung dengan pembelajaran siswa. Cukup banyak pembiayaan yang perlu dikeluarkan oleh sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, alokasi dana yang didapat sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah.

Hasil kajian yang mendukung adalah kajian yang dilakukan oleh FPMIPA IPB pada tahun 2015 dalam Pusat Penelitian Kebijakan (2020). Kajian tersebut melibatkan 49 SLB dalam 16 provinsi yang menghasilkan rekomendasi bahwa perlu adanya variasi terhadap satuan biaya pendidikan per siswa per tahun sesuai jenis kebutuhan oleh penyandang disabilitas (Tabel 4).

Tabel 4 merupakan perhitungan biaya satuan operasional nonpersonal pada SLB berdasarkan jenjang dan jenis gangguan yang dialami anak penyandang disabilitas. Dari besaran biaya satuannya dapat dilihat bahwa terdapat variasi yang berbeda antarjenjang dan antargangguan. Contohnya adalah siswa yang memiliki kekhususan tunarungu atau dalam penelitian ini disebut sebagai anak dengan gangguan pendengaran, pada tahun 2015 biaya operasional yang dibutuhkan oleh sekolah untuk jenjang SDLB sebesar Rp4,49 juta. Pada tahun 2020 dengan tingkat inflasi rata-rata 3,66% per tahun (Bank Indonesia, 2020) biaya operasional yang dibutuhkan oleh sekolah sebesar Rp5,57 juta. Besaran tersebut tentunya sangat jauh jika dibandingkan dengan dana BOS untuk SLB yang saat ini telah diberikan, yaitu sebesar Rp2 juta per siswa per tahun untuk setiap jenjang

Tabel 4 Satuan Biaya Pendidikan di SLB

(dalam juta rupiah)

No	Jenis Kekhususan	Tahun 2015			Estimasi pada Tahun 2020 (Rata-rata inflasi 3,66%)		
		SDLB	SMPLB	SMALB	SDLB	SMPLB	SMALB
1	Tunalaras	4,39	5,68	6,11	5,44	7,04	7,58
2	Tunadaksa	4,43	5,94	6,33	5,50	7,37	7,81
3	Tunagrahita	4,45	5,85	6,29	5,52	7,25	7,80
4	Tunarungu	4,49	5,93	6,34	5,57	7,36	7,81
5	Tunanetra	4,83	6,42	7,21	6,00	7,97	8,91
	Rata-rata	4,52	5,96	6,46	5,60	7,40	8,01

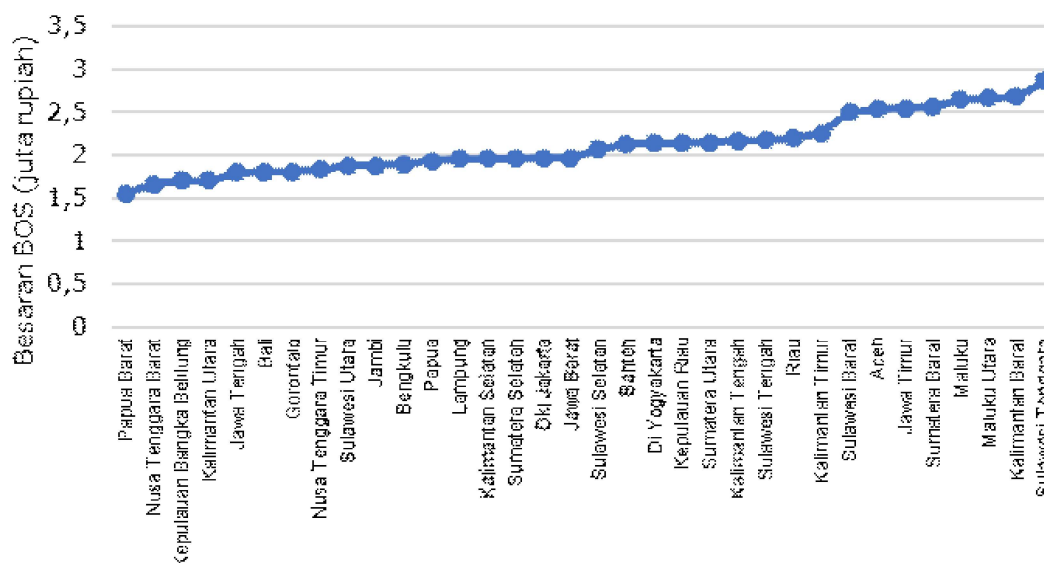
Sumber: Pusat Penelitian Kebijakan (2020), diolah

dan diberlakukan sama tanpa melihat jenis gangguan yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Selain itu, perlunya peran serta pemerintah daerah dan sekolah dalam proses pengajuan dana BOS. Saat ini masih ada beberapa daerah yang mendapatkan dana BOS tidak seimbang dengan jumlah siswa SLB di daerahnya (Gambar 1).

Satuan besaran dana BOS yang diberikan kepada siswa SLB adalah sebesar Rp2 juta per siswa per tahun. Sementara itu, grafik di atas menunjukkan bahwa masih ada daerah yang jumlah total dana BOS 2019 dan 2020 per

siswanya kurang dari Rp2 juta. Daerah dengan rata-rata besaran dana BOS yang terendah adalah Provinsi Papua Barat dengan besaran per siswa sebesar Rp1,5 juta. Besaran dana BOS per siswa yang kurang dari Rp2 juta ini mengindikasikan bahwa di daerah tersebut masih banyak siswa penyandang disabilitas yang bersekolah di SLB tetapi belum diajukan untuk dapat memperoleh dana BOS. Sedangkan daerah yang besaran BOS per siswanya lebih dari Rp2 juta seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar Rp2,8 juta mengindikasikan bahwa seluruh siswa SLB di daerah tersebut telah diajukan untuk mendapatkan

Gambar 1 Besaran Dana BOS SLB per *Unit Cost* di tiap Provinsi

Sumber: Kemendikbudristek (2023), diolah

dana BOS. Selain itu, kemungkinan banyak sekolah di daerah tersebut yang memiliki siswa kurang dari 60 siswa, sehingga besaran dana BOS lebih tinggi dibandingkan dengan standar besaran BOS sesuai juknis. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah dan sekolah pun cukup besar untuk dapat mendaftarkan siswa di sekolahnya agar mendapatkan dana BOS melalui Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

Selain faktor penawaran, terdapat juga permasalahan dari sisi permintaan yang dapat menyebabkan tidak signifikannya besaran dana BOS terhadap APS penyandang disabilitas. Orang tua dengan anak penyandang disabilitas masih harus mengeluarkan biaya yang cukup besar agar anak mereka dapat mengakses pendidikan. Saat ini, BOS sudah mengakomodasi biaya pendidikan yang berkaitan dengan pendaftaran sekolah, kegiatan belajar mengajar, biaya buku, dan biaya ujian. Namun, masih ada biaya pendidikan lainnya yang harus ditanggung oleh orang tua dengan anak penyandang disabilitas yang disebut dengan biaya pribadi peserta didik. Biaya personal pendidikan meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh siswa untuk dapat tetap mengikuti proses pembelajaran secara rutin dan terus menerus (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008).

Tabel 5 diperoleh dari kajian Pusat Penelitian Kebijakan (2020) yang diambil berdasarkan hasil survei terhadap 27 orang tua murid di SLB swasta dan SLB negeri yang tersebar di enam provinsi yaitu Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Berdasarkan data tersebut orang tua masih harus mengeluarkan biaya personal pendidikan yang sudah dibiayai pula oleh BOS, seperti komponen pembiayaan buku sebesar Rp210.000,-/siswa/tahun. Padahal, komponen tersebut dapat dibiayai oleh dana BOS yaitu komponen pengembangan perpustakaan.

Selain itu, hasil survei tersebut menunjukkan adanya biaya iuran sekolah yang harus dikeluarkan oleh orang tua sebesar Rp1,9 juta per tahun atau sekitar Rp150.000,- per bulan. Kurangnya biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah dikarenakan ketidakcukupan bantuan dana dari pemerintah, sehingga sekolah masih harus memungut iuran kepada orang tua.

Uang saku dan biaya transportasi pun menjadi komponen biaya personal paling tinggi di SLB, yaitu sekitar Rp4,5 juta untuk biaya transportasi dan Rp2,8 juta untuk uang saku. Biaya transportasi ini lebih besar di SLB dibandingkan pada jenjang pendidikan lainnya.

Tabel 5 Komponen Biaya Personal Siswa SLB per Tahun

No	Komponen	SLB	Rata-rata Biaya Pendidikan Jenjang Lainnya
1	Buku dan alat tulis sekolah	210.027	366.582
2	Seragam dan perlengkapan	800.562	1.142.120
3	Alat dan bahan pelajaran	433.423	268.739
4	Transportasi siswa	4.423.736	2.735.085
5	Kursus di luar sekolah	1.627.007	1.558.476
6	Karya wisata	182.524	387.968
7	Iuran sekolah	1.963.092	2.445.364
8	Uang saku	2.809.159	2.389.597
9	Biaya pendidikan lainnya	2.902.293	1.539.730
Jumlah Keseluruhan		15,351,823	12,833,661

Sumber: Pusat Penelitian Kebijakan (2020), diolah

Anak penyandang disabilitas dengan kekhususannya menyebabkan hambatan/kesulitan untuk datang ke sekolah menjadi lebih tinggi.

Biaya pendidikan lainnya pun cukup besar harus dikeluarkan oleh orang tua dengan anak penyandang disabilitas yang bersekolah di SLB. Komponen pembiayaan tersebut paling banyak digunakan untuk biaya terapi maupun konsultasi kepada dokter spesialis yaitu sebesar Rp2,9 juta. Besarnya biaya personal yang harus dikeluarkan oleh orang tua dengan anak penyandang disabilitas untuk menyekolahkan anak mereka inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat orang tua tidak mengirimkan anak penyandang disabilitas mereka untuk bersekolah, sehingga berpengaruh pada APS penyandang disabilitas.

Untuk karakteristik individu penyandang disabilitas, berdasarkan hasil regresi (Tabel 2), tingkat kesulitan/gangguan yang dialami oleh anak penyandang disabilitas (variabel: disabilitas berat) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap APS anak penyandang disabilitas. Dengan hasil regresi yaitu kenaikan 1% jumlah penyandang disabilitas dengan tingkat kesulitan yang berat di suatu wilayah, akan menurunkan APS penyandang disabilitas sebesar 0,21%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kautsar *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa individu dengan disabilitas berat memiliki probabilitas untuk bersekolah sebesar 3,6% lebih rendah dibandingkan individu yang memiliki disabilitas ringan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) mengungkapkan hal yang serupa, bahwa tingkat disabilitas yang lebih ringan cenderung meningkatkan partisipasi bersekolah dibandingkan dengan anak penyandang disabilitas yang lebih berat. Penelitian lain yang dilakukan oleh El-Saadani (2019) menyatakan bahwa remaja dengan disabilitas yang parah/berat tidak pernah didaftarkan dalam pendidikan sebanyak 33,9%. Hasil penelitian ini membuktikan tingkat disabilitas yang lebih berat menyebabkan angka

partisipasi bersekolahnya semakin kecil.

Wilayah tempat tinggal anak penyandang disabilitas pun berpengaruh terhadap APS anak penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan 1% anak penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah perkotaan, akan meningkatkan APS penyandang disabilitas sebesar 0,05%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) yaitu penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah urban cenderung 1,141 kali lebih besar untuk bersekolah dibandingkan jika mereka tinggal di pedesaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kautsar *et al.* (2022) menunjukkan hal yang serupa, yaitu anak yang tinggal di wilayah urban memiliki probabilitas yang besar untuk menamatkan sekolah menengah sampai dengan 11,6%. Pada penyandang disabilitas berat pun wilayah perkotaan memiliki probabilitas dengan nilai 1,9% sampai 11,6% untuk menempuh pendidikan.

Lebih tingginya APS penyandang disabilitas yang tinggal di perkotaan tidak terlepas dari kesenjangan pendidikan antara desa dan kota. Wilayah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih mudah untuk menuju ke sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana di wilayah perkotaan pun cenderung lebih baik dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan proporsi lokasi SLB di wilayah perkotaan (92%) lebih besar dibandingkan di wilayah pedesaan (8%) (Kemendikbudristek, 2023).

Untuk karakteristik pendidikan, variabel rasio guru dan siswa SLB tidak memengaruhi APS anak penyandang disabilitas (Tabel 2). Salah satu penyebabnya berkaitan dengan pemerataan jumlah guru di masing-masing wilayah. Secara nasional rasio guru dan siswa SLB relatif cukup memadai yaitu 5,63 yang artinya satu orang guru menangani lima siswa penyandang disabilitas, namun tidak merata guru di setiap daerahnya ternyata masih menjadi masalah. Hal tersebut diungkapkan oleh Novianto (2020),

bahwa dalam suatu daerah masih terjadi kelebihan sekaligus kekurangan guru secara bersamaan. Hal ini menjadi penyebab tidak efektif dan efisiennya pembelajaran di kelas, karena masih ada sekolah yang gurunya memiliki beban kerja yang tinggi dan ada sekolah yang gurunya memiliki beban kerja yang kurang.

Selanjutnya hasil penelitian ini pun menunjukkan, bahwa rasio ketersediaan SLB terhadap 1.000 anak penyandang disabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APS anak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Dewi (2019) yang menyatakan bahwa ketersediaan SLB pada tingkat provinsi memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas.

Data mengenai jumlah SLB pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menunjukkan rata-rata rasio ketersediaan SLB di kabupaten/kota yang rendah yaitu sebesar 5,77 sekolah untuk 1.000 anak penyandang disabilitas usia 7-18. Hal tersebut diartikan bahwa satu SLB harus menampung siswa penyandang disabilitas sebanyak 200 siswa. Sementara itu, rata-rata nasional jumlah siswa penyandang disabilitas dalam satu SLB adalah sebanyak 80 siswa (Kemendikbudristek, 2023). Jumlah SLB yang sedikit inilah yang menyebabkan anak penyandang disabilitas sangat kesulitan untuk menjangkau SLB karena jarak antara rumah dengan SLB yang jauh. Padahal jarak antara rumah dan sekolah sangat berpengaruh terhadap meningkatnya partisipasi sekolah (Khairunnisa *et al.*, 2014; Asmara & Sukadana, 2016; Neupane, 2017).

Meskipun demikian, variabel rasio ketersediaan sekolah inklusi untuk 1.000 anak penyandang disabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap APS penyandang disabilitas. Kenaikan rasio ketersediaan sekolah inklusi sebanyak 1% akan meningkatkan APS penyandang disabilitas sebanyak 0,29%.

Adanya kebijakan mengenai sekolah inklusi ini merupakan angin segar bagi anak penyandang disabilitas. Kesempatan untuk dapat menikmati pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menjadi lebih besar karena mereka diperbolehkan untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, baik itu SD, SMP, maupun SMA/SMK. Seperti yang telah disebutkan dalam beberapa penelitian lainnya bahwa jika jarak dari rumah ke sekolah semakin dekat, maka partisipasi sekolah anak pun meningkat (Khairunnisa *et al.*, 2014; Asmara & Sukadana, 2016; Neupane, 2017).

Untuk karakteristik sosial dan ekonomi, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tidak berpengaruh terhadap APS penyandang disabilitas. Artinya, meskipun suatu daerah memiliki PDRB per kapita yang tinggi belum tentu APS penyandang disabilitasnya pun tinggi. Semakin besar PDRB per kapita suatu wilayah mengindikasikan pendapatan penduduk pada wilayah tersebut semakin tinggi. Dalam hubungannya dengan pendidikan, penambahan pendapatan masyarakat tersebut dapat meningkatkan pula permintaan masyarakat terhadap pendidikan. Namun, tidak sertamerta peningkatan pendapatan tersebut berpengaruh signifikan terhadap APS penyandang disabilitas, karena belum tentu penambahan pendapatan tersebut dialokasikan lebih untuk biaya pendidikan terutama pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwandana (2018) yang menyatakan bahwa PDRB per kapita pun tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat terhadap APS pendidikan menengah dan perguruan tinggi.

Variabel usia harapan hidup merupakan salah indikator kesehatan di kabupaten/kota. Semakin tinggi usia harapan hidup di kabupaten/kota, semakin baik tingkat kesehatan di kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 2, usia harapan hidup tidak

memiliki hubungan yang signifikan terhadap APS penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama usia harapan hidup suatu wilayah belum tentu memiliki APS penyandang disabilitas yang tinggi pula.

Indikator sosial ekonomi yang terakhir adalah rata-rata lama sekolah. Pada hasil regresi Tabel 2, rata-rata lama sekolah memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap APS penyandang disabilitas. Peningkatan satu tahun rata-rata lama sekolah akan meningkatkan APS penyandang disabilitas sebesar 1,57%. Rata-rata lama sekolah ini menggambarkan jumlah tahun belajar penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam jenjang pendidikan formal. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah suatu daerah, semakin tinggi pula kualitas masyarakat di daerah tersebut, karena jenjang pendidikan yang diselesaikan oleh masyarakat tersebut semakin tinggi.

Untuk variabel kontrol regional, berdasarkan hasil regresi Tabel 2 kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera secara signifikan memiliki pengaruh yang positif terhadap APS anak penyandang disabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera memiliki APS anak penyandang disabilitas 5,03 lebih tinggi dari pada kabupaten/kota yang berada di wilayah lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dana BOS untuk SLB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APS anak penyandang disabilitas tahun 2020-2021. Jika dilihat dari sisi penawaran, hal tersebut disebabkan oleh tiga hal. Pertama, masih kurangnya besaran dana BOS untuk SLB jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional sekolah. Selain itu, penggunaan dana BOS masih didominasi untuk membiayai komponen pembayaran guru honorer. Pembiayaan yang berkaitan dengan pembe-

lajaran siswa masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah siswa penyandang disabilitas. Kedua, besaran dana BOS untuk SLB belum memperhatikan jenjang dan jenis kebutuhan/gangguan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Ketiga, masih kurangnya peran pemerintah daerah dan sekolah untuk mengajukan siswa penyandang disabilitas agar mendapatkan dana BOS.

Jika dilihat dari sisi permintaan, salah satu penyebabnya adalah masih besarnya biaya personal pendidikan yang perlu dikeluarkan oleh keluarga dengan penyandang disabilitas. Selain itu orang tua pun masih harus mengeluarkan biaya untuk buku dan iuran sekolah yang semestinya dapat diakomodasi di dalam BOS.

Untuk karakteristik individual penyandang disabilitas, variabel disabilitas berat secara negatif berpengaruh terhadap APS anak penyandang disabilitas. Semakin tinggi persentase anak penyandang disabilitas yang memiliki gangguan/hambatan yang berat, maka menurunkan APS anak penyandang disabilitas. Sementara itu, anak penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah urban berpengaruh positif terhadap APS anak penyandang disabilitas. Semakin banyak penyandang disabilitas yang tinggal di perkotaan/urban, semakin tinggi APS penyandang disabilitas.

Untuk karakteristik pendidikan yaitu rasio guru-siswa SLB dan rasio ketersediaan SLB per 1.000 anak penyandang disabilitas tidak berpengaruh terhadap APS. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah inklusi per 1.000 anak penyandang disabilitas berpengaruh positif terhadap APS penyandang disabilitas. Semakin besar rasio ketersediaan sekolah inklusi per 1.000 anak penyandang disabilitas, APS anak penyandang disabilitas menjadi semakin tinggi. Temuan ini menunjukkan sekolah inklusi memberikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan APS penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemerintah perlu memberikan perhatian dan dukungan yang lebih terhadap

sekolah untuk dapat menyelenggarakan sekolah inklusi.

Untuk karakteristik sosial dan ekonomi, variabel PDRB per kapita, usia harapan hidup, tidak berpengaruh signifikan terhadap APS penyandang disabilitas. Sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap APS penyandang disabilitas. Semakin lama rata-rata lama sekolah, semakin tinggi APS penyandang disabilitas. Selain itu, variabel regional pun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APS anak penyandang disabilitas. Kabupaten/kota yang berada pada wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera memiliki APS anak penyandang disabilitas yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang berada di luar pulau tersebut.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya adalah sebagai berikut.

- a. Perlu adanya evaluasi terhadap besaran dana BOS untuk SLB dengan menyesuaikan kebutuhan riil operasional di sekolah;
- b. Besaran dana BOS di SLB perlu memperhatikan jenjang sekolah dan jenis kebutuhan/gangguan yang dialami oleh setiap anak penyandang disabilitas;
- c. Peran pemerintah daerah dan sekolah perlu dimaksimalkan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi dana BOS SLB, terutama terkait pengajuan dana BOS untuk SLB melalui Dapodik;
- d. Meningkatkan bantuan dari sisi permintaan yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas untuk membantu mengurangi

biaya personal pendidikan anak penyandang disabilitas; dan

- e. Meningkatkan koordinasi antarKementerian/Lembaga untuk dapat memberikan bantuan/subsidi kepada anak penyandang disabilitas.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya digunakan data BOS untuk SLB. Saat ini hanya data tersebutlah yang dapat menggambarkan besaran dana BOS yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas. Dana BOS yang diterima oleh penyandang disabilitas yang berada di sekolah reguler, baik yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag tidak dapat dimasukkan.

Selain itu, penelitian ini tidak memasukkan bantuan lain yang mungkin saja diterima oleh penyandang disabilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Guna memperdalam penelitian, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan seluruh bantuan untuk pendidikan yang diberikan untuk anak penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan variabel pada level daerah yaitu pada tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, belum dapat dilakukan analisis terhadap karakteristik individual yang kemungkinan bisa memengaruhi APS anak penyandang disabilitas, terutama yang berkaitan dengan jarak dari tempat tinggal ke sekolah terdekat, kondisi kesehatan penyandang disabilitas, karakteristik rumah tangga, kualitas guru, kualitas sekolah, maupun dukungan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas. Pada penelitian selanjutnya bisa mengelaborasi faktor-faktor tersebut, baik dengan menggunakan sampel individu maupun level daerah.

PUSTAKA ACUAN

- Abongdia, J-FA., Foncha, J.W. & Dakada, A. (2015). Challenges encountered by teachers in identifying learners with Learning Barriers: Toward inclusive education. *International Journal of Educational Sciences*, 8(3), 493-501, doi.org/10.1080/09751122.2015.11890271
- Asmara, Y.R.I. & Sukadana, I.W. (2016). Mengapa Angka Putus Sekolah masih tinggi? (Studi Kasus Kabupaten Buleleng Bali). *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1347-1383.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Survey Sosial Ekonomi Nasional Kor Maret 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Survey Sosial Ekonomi Nasional Kor Maret 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2020). *Data Inflasi*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>.
- Bhatnagar, N. & Das, A. (2014). Regular school teachers' concerns and perceived barriers to implement inclusive education in New Delhi, India. *International Journal of Instruction*, 7(2), 89-102.
- Black, S.E., Deverex, P.J., & Salvanes, K.G. (2005). The more the merrier? The effect of familiy size and birth order on children's education. *The Quarterly Journal of Economics*, 120 (2), 669-700.
- Dewi, D.C. & Soebijarto, E. (2020). Determinan partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 11(2), 15-28. doi.org/10.34123/jurnalasks.v11i2.131
- Downey, D.B. (1995). When bigger is not better: family size, parental resources, and children's educational performance. *American Sociological Review*, 60(5), 746-761.
- El-Saadani, S. & Metwally, S. (2019). Inequality of opportunity linked to disability in school enrolment among youth: Evidence from Egypt. *International Journal of Educational Development* 67(May 2019), 73-84, doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.04.001.
- Erickson, W.A., VanLooy, S., von Schrader, S., Bruyère, S.M. (2018). Disability, income, and rural poverty. In: Harley, D., Ysasi, N., Bishop, M., Fleming, A. (eds) *Disability and Vocational Rehabilitation in Rural Settings*. Springer, (17-41). doi.org/10.1007/978-3-319-64786-9_2
- Filmer, D. (2008). Disability, poverty, and schooling in developing countries: Results from 14 household surveys. *The World Bank Economic Review*, 22(1), 141-163. doi.org/10.1093/wber/lhm021
- Genova, A. (2015). Barriers to inclusive education in Greece, Spain and Lithuania: Results from emancipatory disability research. *Disability & Society*, 30(7), 1042-1054, doi.org/10.1080/09687599.2015.1075867.
- Kautsar, A., Wulandari, G., Naflah, J.D., Septiavin, Q., Tarani, N.P.M., Amiroh, A.U., Fitri, A., & Kumala, C. (2022). Pengaruh Program Indonesia Pintar bagi para penyandang disabilitas. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 181-192. doi.org/10.31105/jpks.v20i2.2750
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Laporan pencairan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019*, <https://bos.kemdikbud.go.id/rekap/pencairan>.

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Laporan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020*. <https://bos.kemdikbud.go.id/rekap/penyaluran>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. (2023). *Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>
- Khairunnisa, K., Hartoyo, S. & Anggraeni, L. (2014). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 91-112, doi:10.21002/jepi.v15i1.05.
- Lamichhane, K. & Kawakatsu, Y. (2015). Disability and determinants of schooling: A case from Bangladesh. *International Journal of Educational Development* 40(January 2015), 98-105, doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.11.001.
- Mitra, S., Posarac, A., & Vick, B. (2013). Disability and poverty in developing countries: A multidimensional study. *World Development*, 41(January 2013), 1-18, doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.024.
- Mitra, S., Palmer, M., Kim, H., Mont, D., Groce, N. (2017) Extra costs of living with a disability: A review and agenda for research. *Disability and Health Journal*, 10 (4), 475-484. doi.org/10.1016/j.dhjo.2017.04.007.
- Mizunoya, S., Mitra, S. & Yamasaki, I. (2018). Disability and school attendance in 15 low- and middle-income countries. *World Development*, 104(2018), 388-403. doi:10.1016/j.worlddev.2017.12.001.
- Mont, D. & Nguyen, C. (2013). Does parental disability matter to child education? Evidence from Vietnam. *World Development*, 48, 88-107, doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.04.001.
- Neupane, P. (2017). Barriers to Education and School Attainment-Evidence from Secondary Schools in Rural Nepal. *International Education Studies*, 10(2), 68-83 doi.org/10.5539/ies.v10n2p68.
- Nisa, K. Mambela, S., & Badiah, L.I. (2018). Karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. *Abadimas Adi Buana*, 02(1), 33-40.
- Noviani, D.F. (2019). Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang cacat ganda majemuk di Wisma Tuna Ganda Palsigunung Depok. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Novianto, K. (2020). Indeks Pemerataan Guru (IPG): Ikhtiar mempercepat distribusi guru. *Karangan: Jurnal Bidang Kependidikan, Pembelajaran, dan Pengembangan*, 2(02), 83-91. doi.org/10.55273/karangan.v2i02.68
- Pratiningtyas, D. (2021). Program Indonesia Pintar dan pengeluaran pendidikan pada keluarga dengan anak disabilitas. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pusat Penelitian Kebijakan. (2020). *Pendanaan pendidikan dasar dan menengah pada satuan pendidikan formal*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*. Indonesia.

- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasioal Sekolah Reguler*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rutfiana, R.T. & Hayati, B. (2020). Analisa pengaruh pemberian dana pendidikan Bantuan Opersional Sekolah (BOS) terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 41-55,
- Sari, C.N., & Hendriani, W. (2021). Hambatan pendidikan inklusi dan bagaimana mengatasinya: Telaah kritis sistematis dari berbagai negara. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 97-116. doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14154
- SLBN Cicendo Kota Bandung. (2023). *Sejarah singkat SLB Negeri Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*, <https://www.slbncicendo.sch.id/sejarah-2/>.
- Sitanggang, D.A. (2022). Bantuan Operasional Sekolah dan akses pendidikan menengah pada tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2020. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suwandana. (2018). Tingkat Partisipasi Sekolah dan Indikator Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Lingkar Widyaswara*, 5(4), 20-23.
- Tim Publikasi BOS Kemdikbud. (2019a). *Kabar BOS Edisi II*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Publikasi BOS Kemdikbud. (2019b). *Kabar BOS Edisi III*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- UNESCO. (2009). *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2015). *Education For All 2000-2015: Achievements and challenges*. EFA Global Monitoring Report, Paris: UNESCO.
- World Bank. (2014). *Assessing the role of the school operational grant program (BOS) in improving education outcomes in Indonesia*. Jakarta: The World Bank.
- Zamjani, I. (2019). Inklusivitas Program Indonesia Pintar: Studi kasus pelaksanaannya bagi anak berkebutuhan khusus di lima daerah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(1), 15-32. doi.org/10.24832/jpnk.v4i1.1095.